

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BULELENG.

Jalan Wijaya Kusuma Nomor 3 Singaraja Telp (0362) 21648

Email : bkbppbuleleng@yahoo.com-Website:

LAPORAN TAHUNAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA



OLEH

KASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

I MADE SUKARMA,S.Sos.

TAHUN 2020.

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020 PADA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
INFORMASI KELUARGA SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. PEMBINAAN PENGENDILIAN PENDUDUK**
- 2. SOSIALISASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB**
- 3. SOSIALISASI PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN KEPADA STAKEHOLDER.**

**I. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, namun juga menyangkut masalah Pengendalian Penduduk. Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota . Empat Sub urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu : (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub Keluarga Sejahtera, (4) urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan, arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, BKKBN diberi mandat untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda Prioritas ke 3” Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara kesatuan”, Agenda Prioritas ke 5” Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, Serta Agenda Prioritas ke 8” Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Landasan hukum, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan pemerintahan periode 2015 – 2019 di atas, kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015 – 2019 dengan 6 (enam) yang telah ditetapkan; (1) Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (Persen per tahun) dari 1,38 persen / tahun 2015 menjadi,1,21 persen tahun 2019; (2) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per- perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; (3) meningkatnya Contraceptive Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen; (4) Menurunnya kebutuhan ber-Kb tidak terlayani / Unmet Need dari jumlah Pasangan Usia Subur (pesen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019; (5) Menurunnya Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000. perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019; (6) Menurunnya prosentase kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita Usia Subur dari 7,1 tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Di dalam upaya pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis di atas, BKKBN harus dapat melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target / sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Selain itu BKKBN juga harus memperhatikan Perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan melemahnya implementasi program KKBPK di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan pencapaian program, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan program KKBPK untuk periode 2015 - 2019, terutama dalam bentuk kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target / sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

“Kampung KB” melibatkan unsur-unsur institusi masyarakat pedesaan, seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok Akseptor. Juga melibatkan kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Iktipula terlibat para stakeholder seperti Tokoh Agama, Tokoh masyarakat.

Indikator keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu: 1). Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan (kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan); 2). Intensitas Opini Publik tentang program KKBPK beserta intergrasinya dengan lintas sektor; 3). Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja / stakeholder; dan 4). Semangat dan dedikasi para pengelola program di seluruh tingkatan wilayah serta para petugas di lapangan KB (PKB / PLKB), dan 5). Partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, pasangan Usia Subur (PUS) yang Unmet Need (ingin ber- KB tetapi tak mendapat pelayanan) < 10%; Kegiatan Remaja semakin dinamis (minimal 1 kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja per kelompok; Pemahaman dan kemampuan institusi masyarakat pedesaan meningkat (80% mandiri); dan setiap desa / kelompok minimal memiliki satu agama / tokoh masyarakat yang aktif melakukan advokasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang program kependudukan dan KB.

Untuk bidang KS-PK (Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga), Indikator keberhasilan adalah setiap RW memiliki satu kegiatan Tribina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Partisipasi keluarga Balita yang aktif di BKB, BKR dan BKL masing-masing minimal 90%; Partisipasi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu, aktif di UPPKS minimal satu kali dalam satu tahun.

II. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBINAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 58 menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

- *. Kependudukan memiliki spektrum isu yang sangat luas dan berdampak pada berbagai bidang pembangunan, yaitu di bidang sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

- *. Hasil analisis dampak kependudukan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pengembangan kebijakan dan program pembangunan menuju keseimbangan antara penduduk, lingkungan, perkembangan keadaan sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.
- * Proses pembangunan cenderung mencapai output, BELUM PADA DAMPAK bagi kesejahteraan rakyat.

DAMPAK KEPENDUDUKAN DARI PEMBANGUNAN

1. Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi, Budaya yaitu :
 - a. Masih rendahnya angka partisipasi murid sekolah menengah atas / sederajat.
 - b. Masih tingginya jumlah yang melakukan pernikahan dini.
2. Bidang Pembangunan Politik dan Pertahanan Keamanan isu strategis :
 - a. Tingginya angka kriminalitas di daerah perkotaan
 - b. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan kependudukan dengan peraturan daerah terkait.
3. Bidang daya dukung dan tampung lingkungan isu strategis :
 - a. Meningkatnya perubahan lahan pertanian
 - b. Meningkatnya dampak urbanisasi di perkotaan.

Dinamika kependudukan berimplikasi kuat terhadap aspek pembangunan (Ekonomi, Sosial, Politik, Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, pertahanan keamanan).

Dampak Kependudukan terhadap pembangunan

1. Jumlah penduduk Besar
2. Kualitas Penduduk masih rendah
3. Persebaran penduduk tidak merata

Sehingga dari ketiga tersebut berimplikasi kepada : Pangan, Air, Kesehatan, Pemukiman, Lapangan Kerja, Lahan, Keamanan, Infrastruktur, Demografi Lingkungan dan Pendidikan.

2. SOSIALISASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB

Dalam upaya peningkatan daya saing termasuk peningkatan kualitas manusia melalui pembangunan nasional diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat di kampung KB agar menjadi lebih baik dan sejahtera dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Tujuan Kampung KB adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Tujuan Kampung KB adalah : Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ;

- a. Peningkatan jumlah dan akurasi data dan peta keluarga
- b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU/PUS)

- c. Peningkatan jumlah peserta KB MKJP
- d. Peningkatan jumlah Peserta KB Pria
- e. Penurunan angka Unmet Need
- f. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki BKB,BKR,BKL
- g. Peningkatan partisipasi lansia dalam BKL
- h. Peningkatan partisipasi remaja dalam PIK
- i. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama perempuan
- j. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- k. Peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat
- l. Peningkatan Status sosial ekonomi
- m. Peningkatan rata-rata sekolah lama sekolah anak usai sekolah
- n. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- o. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

3. SOSIALISASI PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN KEPADA STAKEHOLDER

KEBIJAKAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

- a. Pengembangan *kebijakan, strategi dan materi teknis* analisis dampak kependudukan
- b. Penguatan *kemitraan dengan stakeholder / mitra kerja* yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan
- c. Peningkatan *Kapasitas SDM pengelola* dalam analisis dampak kependudukan
- d. Pengembangan *kajian ADK (Analisis Dampak Kependudukan) sebagai pendukung policy response* sektor dan daerah terkait dengan wawasan kependudukan.
- e. Pengembangan *model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah.*

STRATEGI ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

1. Merumuskan kebijakan, strategi dan materi teknis analisis dampak kependudukan
2. Mengembangkan *jejaring kemitraan dengan stakeholder / mitra kerja* yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dalam analisis dampak kependudukan
4. Mengembangkan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai kependudukan rekomendasi pembangunan wilayah.
5. Melakukan monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Analisis dampak kependudukan.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM

Dengan kegiatan laporan tahunan yang ke 3 (tiga) item Program KKBPK Tahun 2020 di atas kami dapat rangkum memnjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan anggaran dokumentasi pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan uraian rekapan pelaksanaan program di bawah ini sebagai berikut :

IV. KESIMPULAN

DARI URAIAN 3 (TIGA) SUB KEGIATAN DI ATAS DAPAT DISIMPULKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBINAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAMPAK KEPENDUDUKAN DARI PEMBANGUNAN

1. Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi, Budaya yaitu :
 - a. Masih rendahnya angka partisipasi murid sekolah menengah atas / sederajat
 - b. Masih rendahnya jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini
2. Bidang Pembangunan politik dan Pertahanan keamanan isu strategis :
 - a. Tingginya angka kriminalitas di daerah perkotaan.
 - b. Belum optimalnya sinkronisasi kependudukan dengan peraturan daerah terkait.
3. Bidang Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan isu strategis :
 - a. Meningkatnya perubahan lahan pertanian
 - b. Meningkatnya dampak urbanisasi di perkotaan

Dinamika kependudukan berimplikasi kuat terhadap Aspek Pembangunan (Ekonomi, Sosial, Politik, Daya Dukung dan Daya tampung Lingkungan, Pertahanan Keamanan).

Dampak Kependudukan Terhadap Pembangunan :

1. Jumlah Penduduk Besar
2. Kualitas Penduduk Masih rendah
3. Persebaran Penduduk tidak merata

Sehingga dari ketiga tersebut di atas berimplikasi kepada : Pangan, Air, Kesehatan, Pemukiman, lapangan Kerja, Lahan, Keamanan, Infrastruktur, Degradasi lingkungan dan Pendidikan.

2. SOSIALISASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB

Masih rendah partisipasi daerah, lembaga non departemen dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, serta belum berperan sepenuhnya secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui :

- a. Peningkatan jumlah dan akurasi data dan peta keluarga
- b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU / PUS)
- c. Peningkatan Jumlah Peserta KB MKJP
- d. Peningkatan jumlah Peserta KB Pria
- e. Penurunan Angka Unmet Need
- f. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki BKB, BKR, BKL
- g. Peningkatan Partisipasi Lansia dalam BKL
- h. Peningkatan Partisipasi Remaja dalam PIK
- i. Peningkatan Rata-Rata Usia kawin muda pertama perempuan
- j. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- k. Peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat
- l. Peningkatan Status Sosial Ekonomi
- m. Peningkatan Rata-Rata Sekolah lama sekolah anak usia sekolah
- n. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- o. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

3. SOSIALISASI PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN KEPADA STAKEHOLDER

KEBIJAKAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

- a. Belum optimalnya Pengembangan Kebijakan, Strategi dan materi teknis analisis dampak kependudukan
- b. Belum optimalnya Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder / Mitra Kerja yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan
- c. Masih rendahnya SDM dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Program dilapangan di sembilan Kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam analisis dampak kependudukan
- d. Belum optimalnya Pembangunan Kajian ADK (Analisis Dampak Kependudukan) sebagai pendukung policy responsipe sektor dan daerah dengan wawasan kependudukan.
- e. Belum optimalnya Pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah.

Sehingga sosialisasi penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan kepada stakeholder perlu ditingkatkan lagi mengingat di sembilan kecamatan masih banyak permintaan stakeholder (Kepala Desa) membutuhkan sosialisasi karena program tersebut sangat menyentuk lapisan masyartakat bawah sehingga program tersebut masyarakat dapat memahami secara langsung kegiatan tersebut dan bermanfaat oleh masyarakat untuk masyarakat dalam pelaksanaan penerapan di masing-masing keluarga.

Istilah Stakeholder sering digunakan oleh pihak karena berkaitan dengan berbagai macam ilmu, misalnya seperti Ilmu Bisnis, Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan sumber daya dan sebagainya. Banyak lembaga yang menggunakan istilah ini dalam proses pengambilan keputusan dan di saat implementasinya.

Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Suatu Masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekukasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Atau definisi dari stakeholder yaitu orang yang memiliki minat maupun kepentingan di dalam suatu perusahaan. Hal ini bisa menyangkut kepentingan finansial atau kepentingan lainnya. Jika orang terkena pengaruh dari apa yang terjadi pada perusahaan, baik itu dampak negatif atau positif orang tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder.

Adapun hasil / Outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk sebgai berikut :

- a. Pembinaan Program Pengendalian Penduduk ditiadakan karena ada Virus Covid 19 sehingga sasaran program tidak dilaksanakan :

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Gerokgak	
2.	Seririt	Peserta : 0,-
3.	Busungbiu	0,- :
4.	Banjar	0,-
5.	Sukasada	0,-
6.	Buleleng	Peserta :

	a. SMKN 3 Singaraja	60 orang
7.	Sawan	0,-
8.	Kubutambahan	0,-
9.	Tejakula	0,-
	Jumlah Keseluruhan Pengendalian Penduduk	0,-. orang

Adapun hasil / Outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB sebanyak 3.195. orang sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH 3 kegiatan sebanyak 4.029 orang . a. Pokja Kampung KB b. Forum Musyawarah Kampung KB c. Mini Loka Karya (MINLOK)
1.	Gerokgak : a. Desa Pejarakan tahun 2016 b. Desa sumber Kalmpok tahun 2018 c. Desa Penyabangan tahun 2018 d. Desa Patas (Stunting) tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
2.	Seririt: a. Desa Lokapaksa tahun 2017 b. Desa Ularan tahun 2018 c. Desa Unggahan tahun 2018 d. Desa Bestala tahun 2018 e. Desa Munduk Bestala tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
3.	Busungbiu: a. Desa Sepang tahun 2017 b. Desa Sepang Kelod tahun 2018 c. Desa Tista tahun 2018 d. Desa Bongancina tahun 2018 e. Desa Pucaksari tahun 2018 f. Desa Titab tahun 2018 g. Desa Telaga tahun 2018 h. Desa Subuk tahun 2018 i. Desa Tingarsari tahun 2018 j. Desa Kedis tahun 2018 k. Desa Bengkel tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
4.	Banjar: a. Desa Kaliasem tahun 2017 b. Desa Tirtasari tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang
5.	Sukasada: a. Desa Pegayaman tahun 2018 b. Desa Tegalinggah tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang
6.	Buleleng: a. Desa Alsangker tahun 2017 b. Desa Poh Bergong tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang
7.	Sawan a. Desa Menyali 2017	Peserta : 30 orang

	b. Desa Sekumpul (Stunting) tahun 2018 c. Desa Galungan (stunting) tahun 2018 d. Desa Kerobokan (Stunting) tahun 2018 e. Desa Lemukih tahun 2018	30 orang 30 orang 30 orang
8.	Kubutambahan: a. Desa Depaha tahun 2017 b. Desa Tunjung tahun 2018 c. Desa Kubutambahan (stunting) tahun 2018 d. Desa Bulian (Stunting) tahun 2018	Peserta : 30 orang 30 orang 30 orang 40 orang
	Tejakula a. Desa Tembok tahun 2017 b. Desa Sembiran tahun 2018.	Peserta : 30 orang 30 orang
	Sosialisasi Pendidikan kependudukan di Kampung KB, Jumlah Keseluruhan (4.029 – terlaksana 3.195 = 834.= $3.195 : 4.029 = 79 \%$. Dan tidak terlaksana $834 : 4.029 = 20,6 \%$	3.195. orang

Meningkatnya Pemahaman Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB, 3.195 orang melalui :

- a. Peningkatan jumlah dan akurasi data dan peta keluarga
- b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU / PUS)
- c. Peningkatan Jumlah Peserta KB MKJP
- d. Peningkatan jumlah Peserta KB Priae.
- e. Penurunan Angka Unmet Need
- f. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki BKB,BKR,BKL
- g. Peningkatan Partisipasi Lansia dalam BKL
- h. Peningkatan Partisipasi Remaja dalam PIK
- i. Peningkatan Rata-Rata Usia kawin muda pertama perempuan
- j. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- k. Peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat
- l. Peningkatan Status Sosial Ekonomi
- m. Peningkatan Rata-Rata Sekolah lama sekolah anak usia sekolah
- n. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- o. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

Adapun hasil / Outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kepada Stakeholder karena covid 19 tidak bisa terlaksana sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Gerokgak	0,-
2.	Seririt:	0,-
3.	Busungbiu	Peserta : 0,- orang
4.	Banjar	0,-

5.	Sukasada	0,-
6.	Buleleng	0,-
7.	Sawan	0,-
8.	Kubutambahan	Peserta : 0,- orang
9.	Tejakula	Peserta : 0,- orang
	Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kepada Stakeholder, Jumlah Keseluruhan 0,- orang (karena dipakai Covid 19 /Virus Corona)	0,-. orang

Tidak bisa terlaksana Program **Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kepada Stakeholder, 0,- % orang** melalui s kegiatan :

- Pengembangan **kebijakan, strategi dan materi teknis** analisis dampak kependudukan
- Pengutan **kemitraan dengan stakeholder / mitra kerja** yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan
- Peningkatan **Kapasitas SDM pengelola** dalam analisis dampak kependudukan
- Pengembangan **kajian ADK (Analisis Dampak Kependudukan) sebagai pendukung policy response** sektor dan daerah terkait dengan wawasan kependudukan.
- Pengembangan **model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah.**

menyangkut kepentingan finansial atau kepentingan lainnya. Jika orang terkena pengaruh dari apa yang terjadi pada perusahaan, baik itu dampak negatif atau positif orang tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder.

b. Tidak Terbinanya kader di Sembilan Kecamatan Kabupaten Buleleng yaitu karena covid 19 al : TOGA (Tokoh Agama) TOMA (Tokoh Masyarakat), TODAT (Tokoh Adat ,POKTAN (Kelompok Kegiatan),POKTAN (Kelompok Kegiatan) Babinkantibmas, dan Babinsa dari ketiga program pokok tersebut, tentang Pemahamannya tidak bisa terlaksana :

- Pembinaan Pengendalian Penduduk, sebanyak 0,- orang
- Sosialisasi Pendidikan di Kampung KB, sebanyak 3.195,- orang
- Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kepada Stakeholder sebanyak 0,-orang.

Adapun hasil / outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pengendalian penduduk dengan hasil :

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan / kendala dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk antara lain :

- Jumlah Penduduk besar
- Kualitas penduduk masih rendah
- Persebaran penduduk tidak merata
- Masih rendah partisipasi daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, serta belum berperan sepenuhnya secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Peningkatan jumlah dan akurasi data dan peta keluarga
2. Peningkatan jumlah KB aktif (CU / PUS).
3. Peningkatan Jumlah peserta KB MKJP
4. Peningkatan jumlah peserta KB pria
5. Penurunan angka Unmet Need
6. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki BKB,BKR,BKL.
7. Peningkatan partisipasi Lansia dalam BKL
8. Peningkatan Partisipasi Remaja dalam PIK
9. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
10. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat
12. Peningkatan Status Sosial Ekonomi
13. Peningkatan Rata-Rata Sekolah lama sekolah anak usia sekolah
14. Peningkatan Lingkungan dan Pemukiman yang sehat
15. Peningkatan Kualitas Pembangunan Sektor Pembangunan terkait.

Permasalahan / kendala dalam penyelenggaraan Urusan Sosialisasi Pendidikan di Kampung KB antara lain :

1. Pengisian konten Data Online dan Offline belum bisa dipahami oleh kelompok kerja kampung KB yang ada di masing-masing 37 kampung KB.karena belum dapat latihan secara menyeluruh dari BKKBN Provinsi Bali
2. Kelompok Kerja kampung KB tidak dapat insentif / honor dalam melaksanakan tugasnya.
3. Sarana prasara dalam fasilitasi program antara lain belum dapat lektop.
4. Jaringan internet sering mengalami gangguan sehingga data online offline tidak bisa diakses secara menyeluruh
5. SDM Pokja Kampung KB dilapangan masih rendah tentang IT.(Gatek) Gagap Teknologi
6. Di masing-masing Desa Kampung KB belum semua terpasang Waipi
7. Signal Waipi sering mengalami kendala dan data hilang.

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Bekerja sama kepada Stakeholder OPD terkait dalam menanggulangi persoalan ini melalui anggaran APBD, APBD Des dan Anggaran APBN untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB agar lebih sejahtera.
2. Mencari solusi -solusi dan berinovatif dalam mengatasi kendala tersebut melalui Komunikasi, koordinasi, Informasi sehingga pelaksanaan tugas bisa diatasi.
3. Tidak cepat putus asa dalam memberikan pemahaman kepada stakeholder agar program bisa terlaksana dan tepat sasaran sesuai dengan rencana.
4. Memberikan win win solusien kepada stakeholder yang berpengaruh terhadap program Kampung KB.

Permasalahan / kendala dalam penyelenggaraan Urusan Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kepada Stakeholder, antara lain :

- a. Belum optimalnya Pengembangan Kebijakan, Strategi dan materi teknis analisis dampak kependudukan
- b. Belum optimalnya Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder / Mitra Kerja yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan

- c. Masih rendahnya SDM dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Program dilapangan di sembilan Kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam analisis dampak kependudukan
- d. Belum optimalnya Pembangunan Kajian ADK (Analisis Dampak Kependudukan) sebagai pendukung policy responsipe sektor dan daerah dengan wawasan kependudukan.
- e. Belum optimalnya Pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah.

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Merumuskan kebijakan, strategi dan materi teknis analisis dampak kependudukan
2. Mengembangkan ***jejaring kemitraan dengan stakeholder / mitra kerja*** yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dalam analisis dampak kependudukan
4. Mengembangkan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai kependudukan rekomendasi pembangunan wilayah.
5. Melakukan monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Analisis dampak kependudukan.

V. PENUTUP.

Demikian yang dapat kami simpulkan dari ke 3 (tiga) program di atas dalam rangka hasil pelaksanaan anggaran tahun 2019 di Bidang Kependudukan Dan Informasi Keluarga dan dilampiri dengan pendukung kegiatan tersebut di bawah ini, Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua kepada stakeholder terkait.

Mengetahui :

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Penyuluhan dan Penggerakan,

I Gusti Made Suardana,SH,
NIP : 19680807 199503 1 007.

Singaraja,, 31 Desember 2020.

Yang membuat laporan,
Kasi Pengendalian Penduduk
Dan Informasi Keluarga,

I Made Sukarma,S.Sos.
NIP : 19641231 198902 1 028.